

**JURNAL
DISRUPSI BISNIS**

ISSN 2621 – 797X
Jurnal Disrupsi Bisnis, Vol. 1, No. 3, November 2018 (1 -15)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Pamulang

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET
BARANG MILIK NEGARA
(STUDI KASUS DI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA)**

Endang Suprpti
Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
dosen00728@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengarsipan data perlengkapan yang terstruktur; Mendapatkan sistem informasi manajemen pengelolaan aset BMN sehingga memudahkan fungsi pengawasan dalam kegiatan pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan BMN; Membandingkan antara peraturan, teori dan pelaksanaan dalam pengelolaan aset; Untuk mengetahui keberhasilan SIMAK-BMN yang ada di Badan Meteorologi, Klimatologi (BMKG).

Metode penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menguraikan secara mendalam mengenai “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN) di BMKG dan penelitian Sistem Informasi Manajemen apakah yang efektif dan efisien untuk pengelolaan BMN di BMKG”

Dari hasil penelitian terhadap kegiatan pengelolaan aset BMN di BMKG diperoleh hasil bahwa: Terdapat 2 (dua) buah Sistem informasi BMN yaitu: 1) Sistem aplikasi SIMAK-BMN, menghasilkan informasi data kumulatif (*global*) untuk memenuhi kebutuhan pelaporan neraca keuangan Pemerintah Pusat; 2) Sistem penatausahaan BMN menghasilkan informasi data rinci (*detail*) untuk memenuhi kebutuhan manajemen seperti perencanaan penganggaran, perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan penghapusan dan lain-lain, secara manual melalui sistem penatausahaan BMN.

Berdasarkan evaluasi dan analisis dari kedua sistem tersebut diatas, masih banyak permasalahan dihadapi sehingga sudah menjadi suatu kebutuhan dan merupakan hal yang penting untuk segera dibuat “Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan (SIM-P)”.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset (BMN)

ABSTRACT

The research is to deliver an image of a structured filling of equipment data; to produce a Management Information System of Asset Management of Government Properties (SIMAK-BMN), to abridge monitoring system in Government Properties maintenance, supplying, and abolition; comparing between policy, theory, with implementation in Asset Managing; to find out success of Management Information System of Asset Management of Government Properties (SIMAK-BMN) in Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

The research method is qualitative research method. The using of qualitative research approach is to explain deeply about "Application of Management Information System of Asset Management of Government Properties (SIMAK-BMN) in BMKG and what kind of Management Information System research which will be effective and efficient to the management of Government Properties".

From the research result of the Government Properties asset management activity in BMKG, there are some results: there are 2 (two) classifications of Government Properties Information System: 1) SIMAK-BMN application system, producing cumulative data information (global) to fulfill the reporting needs of central government finances balance; 2) BMKG Administration Systems producing detail data to fulfill management needs such as budgeting planning, supplying planning, maintenance planning, abolition planning, etc, manually through the BMN Administration System.

Based on evaluation and analysis results of both systems, there are still some problems, so that it is really important to make a Management Information System for Equipments (SIM-P) as soon as possible.

Keywords: *Management Information System of Asset Management of Government Properties (BMN)*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegagalan pemerintahan Orde Baru maupun rejim lainnya di Indonesia dalam interaksi sosial-ekonomi-politik antara pemerintah dengan masyarakat, secara umum dan mendasar disebabkan oleh pendekatan yang kurang tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Usaha pemerintah dalam memulihkan kondisi dari krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah melalui perwujudan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance* (kepemerintahan yang baik). Usaha tersebut didukung oleh banyak pihak, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif, pers, maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), (Edy Topo dan Desi F, 2001:3).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2002 tentang: *Kepemerintahan yang baik*, dirumuskan pengertian *Good governance* yaitu: "Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat."

Sedangkan menurut Getta (2008: 1), pemerintahan yang baik ditandai dengan 3 (tiga) elemen, yaitu: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi, dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi, maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan pemerintahan yang baik dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat.

Komitmen dari pemerintah untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sudah mulai sejak diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapan Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang: Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sudah menjadi agenda yang harus

dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Sebagai salah satu upaya guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah dengan cara membangun sistem informasi pemerintah, (Agus Witjaksono, 2009).

Menurut Agus Witjaksono (2009), salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta dalam rangka menjamin terlaksananya tertib pengelolaan BMN diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan BMN yaitu dengan cara membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagai sistem informasi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/2007 tentang: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.

Menurut PMK Nomor 171/2007 bahwa SIMAK-BMN adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber keuangan. Selain itu, SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk neraca. Sehingga dengan demikian SIMAK-BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban sekaligus.

SIMAK BMN disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang pernah atau yang memang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada bagian atau seksi perlengkapan/ rumah tangga atau yang semacamnya sehingga sesuai struktur Unit Akuntansi Barang (UAB) melekat kewajiban untuk penyusunan laporan BMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (Firmansyah, 2008).

Permasalahan krusial dalam pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, masih belum semua BMN yang dikuasai Kementerian Negara/Lembaga diinventarisasi secara lengkap dan belum diberi nilai wajar (BPK-RI, 2008).

Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana penerapan SIMAK-BMN serta sistem informasi yang ada saat ini apakah efektif untuk pengelolaan aset BMN di BMKG perlu dilakukan penelitian, karena sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian dan pengembangan sistem informasi terhadap pengelolaan BMN di BMKG.

Penelitian dilakukan di Bagian Perlengkapan-Biro Umum BMKG, karena sesuai Peraturan Kepala BMKG Nomor: KEP.03 Tahun 2009 tanggal 17 April tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BMKG, penanganan Aset BMN di BMKG, merupakan tugas dan tanggung jawab Bagian Perlengkapan. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh terhadap pelaksanaan pelaporan barang milik negara dalam kerangka SIMAK-BMN dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberi nilai manfaat dalam proses penyusunan laporan.

Dalam manajemen pemerintahan modern, sistem informasi manajemen merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan pada setiap unit organisasi pemerintahan, yang tidak terbatas pada tingkat departemen dan lembaga negara saja, melainkan pemerintah secara keseluruhan. Sistem informasi manajemen yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan (prakondisi), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana (William Leffingwell & Edwin Robinson).

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (STUDI KASUS)”

2. Perumusan Masalah

Dari sekian banyak permasalahan yang terjadi pada pengelolaan aset BMN di BMKG penulis mengambil 2 (dua) permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. *"Sejauh Manakah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN) di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)"?*
2. *Sistem Informasi Manajemen Apakah yang Efektif dan Efisien untuk Pengelolaan BMN di BMKG?*

3. Pembatasan Masalah.

Ruang lingkup pengelolaan BMN dalam penelitian ini dibatasi pada kegiatan program penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dibatasi pada pengelolaan BMN. Sedangkan lokasi penelitian dibatasi pada Bagian Perlengkapan Biro Umum kantor BMKG pusat yang terletak di jalan Angkasa I nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat.

4. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian dan pengembangan sistem informasi terhadap pengelolaan aset BMN di BMKG adalah:

1. Mendapatkan gambaran bagaimana pengarsipan data perlengkapan yang terstruktur;
2. Mendapatkan sistem informasi manajemen pengelolaan aset BMN , sehingga memudahkan fungsi pengawasan dalam kegiatan pemeliharaan, pengadaan dan penghapusan BMN
3. Untuk membandingkan peraturan, teori dan pelaksanaan dalam pengelolaan aset BMN;
4. Untuk mengetahui keberhasilan SIMAK-BMN yang ada.

5. Manfaat Penelitian.

1. Bagi BMKG:
Sebagai masukan bagi pimpinan BMKG Pusat maupun UPT di daerah dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan aset BMN pada masa yang akan datang,
2. Bagi Peneliti:
 - a. Sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas Pamulang;
 - b. Untuk mempraktekkan teori yang diperoleh selama studi di Universitas Pamulang.
3. Pihak Lain:
Sebagai bahan untuk mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut atau sebagai bahan masukan untuk penerapan pelaksanaan sistem informasi manajemen pengelolaan aset BMN secara lebih baik sesuai kaidah dan perkembangan manajemen secara modern dan profesional.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori Informasi

Menurut Sanyoto (2009:259), suatu informasi yang baik dalam perusahaan akan memberikan manfaat sangat berarti bagi perusahaan itu sendiri, karena:

- a. Dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang benar.
- b. Melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penggelapan-penggelapan/penyelewengan

- c. Kegiatan organisasi akan dapat dilaksanakan dengan efisien.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan.
- e. Tidak memerlukan detail audit dalam bentuk pengujian substansif atas bahan bukti/data perusahaan yang cukup besar oleh akuntan publik.

2. Sistem Informasi

Menurut Wing Wahyu Winarno,(2006:12.10) Sistem informasi merupakan berbagai perangkat dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menjamin agar sistem informasi tetap dapat digunakan dengan baik. Sistem informasi harus tetap terjaga kualitas penerimaan inputnya, proses datanya, dan penyajian informasinya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 Sistem Informasi adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Barang Milik Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Agar tujuan organisasi berjalan sesuai yang seharusnya menurut Agus W (2009:1), maka perlu ada pengawasan. Salah satu bentuk/cara pengawasan ialah yang disebut sistem informasi (*strong internal control system*) yang melekat pada sistem dan prosedur organisasi tersebut. Tujuan dirancangnya sistem informasi adalah untuk:

1. Mengamankan aset organisasi,
2. Memperoleh informasi yang lengkap, dan dapat dipercaya (keandalan pelaporan keuangan),
3. Mendorong efektivitas, efisiensi, dan ekonomis kegiatan operasi organisasi
4. Mendorong kepatuhan pelaksanaan terhadap kebijakan organisasi/pemimpin serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Sanyoto (2009:259), James Hall (2004, p143) tujuan disusunnya sistem kontrol atau sistem informasi manajemen berbasis komputerisasi adalah untuk:

1. Meningkatkan pengamanan (*improve safeguard*) aset sistem informasi (data/catatan akuntansi (accounting record) yang bersifat *logical assets*, maupun *physical assets* seperti *hardware*, *infrastructures*, dan sebagainya).
2. Meningkatkan integritas data (*improve data integrity*), sehingga dengan data yang benar dan konsisten akan dapat dibuat laporan yang benar.
3. Meningkatkan efektifitas sistem (*improve system effectiveness*).
4. Meningkatkan efisiensi sistem (*improve system efficiency*).

3. Asas Pengelolaan BMN

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: Asas fungsional, Asas kepastian hukum, Asas transparansi, Asas efisiensi, Asas akuntabilitas, Asas kepastian nilai.

4. Aset

Aset pemerintah menurut UU nomor 1 tahun 2004 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang. Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari aset pemerintah yang berwujud.

Menurut Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Nomor: Kep. 011 tahun 2008, September 2008, tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, aset adalah potensi ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga berupa peralatan kantor yang mempunyai manfaat untuk kegiatan operasional dimasa depan.

Aset menurut UU nomor 1 tahun 2004 maupun menurut Kep. 011 tahun 2008 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Aset tetap .
Aset tetap yaitu aset yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun (Tanah, gedung, peralatan kantor, mesin, kendaraan bermotor).
- b. Aset lancar.
Aset lancar yaitu aset yang mempunyai nilai manfaat kurang dari 1 (satu) tahun (alat tulis kantor, pakaian dinas pegawai, dan lain sebagainya).

5. Barang Milik Negara (BMN)

Barang Milik Negara. Barang Milik Negara menurut Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor: KEP. 001 tahun 2008 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh oleh beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada di bawah penguasaan dan atau pengawasan serta pengurusan dan atau pengawasan serta pengurusan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika beserta unit-unit dalam lingkungannya.

- a. Dari segi sifatnya BMN meliputi:
 - 1) Barang-barang tidak bergerak;
 - 2) Barang bergerak;
 - 3) Hewan;
 - 4) Barang dalam persediaan.
- b. Dilihat dari segi pengurusannya, BMN terdiri dari:
 - 1) Barang inventaris (barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan)
 - 2) Barang dalam persediaan (gudang)

6. Sistem pelaporan pengelolaan BMN.

Sistem pelaporan pengelolaan BMN mengacu pada PMK. 171 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.

SAPP memiliki 2 (dua) sub sistem yaitu:

- a. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
SAK digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
SIMAK-BMN memproses transaksi perolehan, perubahan dan penghapusan BMN untuk mendukung SAK dalam rangka menghasilkan Laporan Neraca

7. Dasar Hukum Pengelolaan BMN.

1. Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. PMK. 96/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
4. PMK. 97/2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara

5. PMK. 120/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
6. Peraturan KBMG No. 07 tahun 2007 tentang TTP Penatausahaan BMN di lingkungan BMG
7. Peraturan KBMG No. KEP.011 Tahun 2008 Tentang TTP Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan BMG
8. Peraturan KBMG No. KEP.004 Tahun 2008 tentang Penetapan Penggolongan dan Kodifikasi BMN di Lingkungan BMG
9. PMK. 171/2007 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Pusat
10. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln (1987, 3), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Pengertian lain mengenai pendekatan kualitatif yaitu hasil penelitian dengan teknik-teknik wawancara yang menggali studi kasus tertentu (Rusady Ruslan, 212).

2. Pengertian Pendekatan Kualitatif

Pendekatan dengan jenis kualitatif ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau cara kualifikasi lainnya (Ibid, 213). Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan,, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (menyeluruh) (Ibid, 213).

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menguraikan secara mendalam mengenai “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN) di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Sistem Informasi Manajemen Apakah yang Efektif dan Efisien untuk Pengelolaan BMN di BMKG?”

3. Ciri-Ciri Pendekatan Kualitatif.

Penelitian kualitatif untuk memperoleh data dan analisa yang sifatnya mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *deskriptif*. Penelitian bersifat *deskriptif* adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Hari Lubis dan Martani).

Jenis penelitian bersifat *deskriptif* dimaksud untuk mendapatkan gambaran yang cermat mengenai sistem informasi terhadap pengelolaan aset BMN di BMKG. Penelitian kualitatif dalam kaitannya dengan studi yang diangkat dalam penelitian ini adalah penulis ingin menggali lebih dalam tentang sistem informasi terhadap penanganan aset BMN di BMKG, sebagai ruang lingkup penelitian.

4. Subjek Penelitian.

Populasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:80-81).

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari tetapi meliputi

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki obyek/subyek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah unit-unit yang berada di bawah Bagian Perlengkapan Biro Umum.

Populasi ini dipandang sudah dapat mewakili pengelolaan seluruh BMN di BMKG karena unit-unit yang berada dibawah Bagian Perlengkapan inilah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menangani pengelolaan aset BMN di BMKG, disamping itu unit-unit ini pulalah yang melakukan pembinaan pengelolaan aset BMN di seluruh Indonesia.

Sampel.

Sampel adalah sebagian dari populasi, karena sampel merupakan bagian dari populasi, tentulah mempunyai ciri-ciri yang dimiliki (Saifudin Azwar, 79) Didalam penelitian ini bukan menggunakan istilah sampel penelitian tetapi subyek penelitian.

Menurut Suharsini Arikunto, subyek penelitian mempunyai kedudukan sangat sentral, karena pada subyek penelitian itulah data tentang variable yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti (Hari Lubis dan Martani 109). Suharsini Arikunto mengungkapkan subyek penelitian adalah benda, hal, orang atau tempat data untuk variable penelitian melekat dan dipermasalahkan. Penelitian kualitatif selalu bertolak dari asumsi tentang realita sosial yang bersifat unik (Hari Lubis dan Martani).

Adapun teknik pengambilan subyek penelitian adalah menggunakan pengambilan sampel (*purpose sampling*) adalah teknik penentuan subyek penelitian dengan pertimbangan tertentu (Kuncoro, 2003:119). Pengertian lain dari *purpose sampling* adalah pengambilan sampel didasarkan pada pilihan penelitian tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus menerus sepanjang penelitian. Sampling bersifat *purposive* yaitu tergantung pada tujuan fokus (Nasution, 2006:29).

Didalam penelitian ini menggunakan *purpose sampling*, karena melakukan penelitian di Bagian Perlengkapan Biro Umum BMKG, bertujuan untuk membantu pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang bebas dari KKN dengan membentuk sistem informasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sehingga terciptanya sistem kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Dengan teknik tersebut diatas melalui penelitian ini, penulis mencoba memasuki unit-unit yang ada pada bagian perlengkapan, yaitu fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan tugas pokok. Disini penulis akan menemukan permasalahan yang menarik dalam penyelenggaraan tugas pokok. Penulis mencoba mengungkapkan permasalahan tersebut melalui penelitian ini. Suatu penelitian pastinya membutuhkan masukan/info dari para responden dan akan diproses menjadi sebuah data yang dicari penulis.

Informan dan Metode Pemilihan Informan.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam kurun waktu yang *relatif* singkat banyak informasi yang terjangkau sebagai *Internal Sampling*, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Hari Lubis dan Martani).

Dalam variabel penelitian ini adalah individu yang berperan sebagai informan. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk menjangkau sebanyak mungkin informan dari berbagai sumber yang akan menjadi dasar dari penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah karyawan BMKG dengan jabatan tertentu dalam setiap unit dilingkungan bagian perlengkapan, biro umum. Dalam Bagian perlengkapan terdapat tiga sub bagian dan dua kepala urusan, dimana setiap orang tersebut

akan memberikan penjelasan mengenai “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN) di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)”. Penelitian ini juga akan meneliti ”Sistem Informasi Manajemen Apakah yang Efektif dan Efisien untuk Pengelolaan Aset BMN di BMKG”

1. Fungsi organisasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

- a. Sub Bagian Pengelolaan BMN
- b. Sub Bagian Pengadaan
- c. Sub Bagian Pemeliharaan
- d. Urusan Gudang
- e. Urusan Kendaraan Dinas

2. Tempat:

Alamat fungsi organisasi yang menjadi fokus penelitian ini terletak di jalan Angkasa 1 nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat.

3. Waktu:

Waktu untuk penelitian ini dari bulan Juli sampai dengan Desember 2016.

4. Kriteria Informan:

Metode pemilihan informan dalam penelitian ini mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Karyawan BMKG
- b. Jenis kelamin perempuan atau laki-laki
- c. Masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun
- d. Memiliki peranan penting yang berkaitan dengan objek yang diteliti
- e. Mampu menjelaskan *job description* dalam setiap unit atau fungsi kerjanya

Profil Informan.

1. SA (Kepala Sub Bagian BMN) BMKG.

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran dan informasi secara rinci/detail mengenai kegiatan pengelolaan BMN khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penatausahaan, inventarisasi dan penghapusan BMN di lingkungan BMKG.

2. BD (Kepala Sub Bagian Pengadaan).

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mengenai pengadaan barang/jasa di BMKG. Penulis mengambil sebagai informan ke dua karena beliau sudah lama bekerja di Sub Bagian Pengadaan BMKG ini sejak tahun 1985, dan beliau cukup mengetahui dengan jelas proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa di BMKG.

3. SH (Kepala Sub Bagian Pemeliharaan).

Sebagai informan ke tiga karena beliau sudah lama bekerja di Sub Bagian Pemeliharaan BMKG ini sejak tahun 1980 dan beliau cukup mengetahui dengan jelas pelaksanaan, pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan AC, Genset, listrik, Komputer, urusan pengamanan serta sarana dan prasarana Kantor BMKG Pusat.

4. SD (Kepala Urusan Gudang).

Sebagai informan ke empat karena staf ini sudah 20 (dua puluh) tahun bekerja sebagai staf Urusan Gudang perusahaan dan dapat memberikan informasi tentang barang persediaan dan barang inventaris.

5. BS (Kepala Urusan Kendaraan).

Sebagai informan ke lima karena staf ini juga sudah lama bekerja di BMKG dan dapat memberikan informasi mengenai pemeliharaan kendaraan dinas, baik roda dua, empat, enam atau delapan.

Metode Pengumpulan Data.

Dalam penelitian kualitatif ini, data dikumpulkan dari berbagai macam sumber. Data terbagi atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer atau sumber data utama penelitian ini berupa kata-kata, tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan cara mendalam (*indeept interview*) tak berstruktur terhadap lima informan.

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) dalam buku kutipan Lexy J. Moleong antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. (Hari Lubis dan Martani).

Wawancara tak berstruktur susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. Wawancara tak berstruktur ini bersifat fleksibel susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Dedy Mulyana)

Dalam wawancara ini, peneliti ingin mendapatkan *deskriptif* atau gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan sistem informasi apakah efektif untuk penanganan aset BMN di BMKG.

2. Data Sekunder

Sumber kedua penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa dokumen-dokumen perusahaan tempat penelitian dilakukan yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari berbagai catatan yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, seperti profil organisasi BMKG, brosur, buku-buku, dokumen, catatan, sistem informasi yang berkaitan dengan substansi permasalahan yang diteliti, *Website*, dan majalah *internal* BMKG dan kliping surat kabar.

Metode Analisis Data.

Menurut Nasution (1996:129), analisis data yang dianjurkan ialah mengikuti langkah-langkah yang masih bersifat umum, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terinci. Laporan ini akan terus-menerus bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis sejak awal. Laporan ini perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan yang disingkat, direduksi dan disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan sistematis dan mudah dipahami.

3. Pengambilan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan terhadap data yang telah direduksi mengambil kesimpulan terhadap data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis dengan membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah serta mampu menjawab permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai (Nasution (1996:129)

Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang "dituduhkan" pada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisah dari pengetahuan penelitian

kualitatif. Dengan kata lain, apabila penelitian melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat, maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, yaitu : **Kepercayaan (Credibility), Keteralihan (Transferability), Kepastian (Confirmability).**

Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian.

Kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang dialami penulis selama melakukan penelitian di lapangan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini tidak dapat mengungkap secara terperinci nilai-nilai strategis terhadap neraca laporan keuangan maupun laporan BMN karena bersifat rahasia Negara.
2. Adanya kesulitan dalam analisa, karena keterbatasan dalam masalah teknis, seperti jenis dokumen sangat banyak tetapi data yang ada kurang lengkap sehingga peneliti kadang bersifat subyektif dalam menginterpretasikan data yang ada.
3. Pengambilan data melalui wawancara dapat memungkinkan informan hanya berkata pada hal-hal ideal, berlebihan, dan bahkan menyimpang dari apa yang ditanyakan.
4. Keterbatasan pada saat membuktikan data pada dokumen dengan fakta dilapangan, karena lokasi penempatannya sebagian besar sudah tidak sesuai dengan dokumen, dan lain sebagainya, sehingga perlu waktu yang agak lama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

1. Analisis Kualitatif Data Responden yang di Wawancara
 Organisasi : Bagian Perlengkapan Biro Umum BMKG
 Obyek Penelitian : Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN)
 Tempat : Jalan Angkasa 1 nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat
 Waktu Penelitian : Bulan Juli s/d Desember 20016
 Jumlah Responden : 5 orang

Tabel 1 . Data Responden

INITIAL RESPONDEN	PROFIL RESPONDEN				
	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN	UMUR	MASA KERJA
SA	LAKI-LAKI	Ka. Sub Bag BMN	S2	48	22
BD	LAKI-LAKI	Ka. Sub Bag Pengadaan	D.III	45	19
SH	LAKI-LAKI	Ka. Sub Bag Pemeliharaan	S2	54	28
SR	LAKI-LAKI	Karus Gudang	S1	40	14
BS	LAKI-LAKI	Karus Kendaraan	SLTA	50	23

PEMBAHASAN TEMUAN DIKAITKAN DENGAN JUSTIFIKASI TEORITIK

Penelitian dilakukan dengan menganalisis sejauh manakah penerapan SIMAK-BMN di kantor Pusat BMKG. Menurut Wing Wahyu Winarno (2004) , analisis adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen-komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan,

kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan,

Menurut Firmansyah, 2008, SIMAK BMN disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang pernah atau yang memang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada bagian atau seksi perlengkapan/ rumah tangga untuk penyusunan laporan BMN kementerian negara/lembaga. Dari hasil analisis diperoleh gambaran bahwa:

Pertama, penerapan Sistem Aplikasi SIMAK-BMN, menghasilkan informasi data kumulatif (*global*) yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan “Pelaporan Neraca Akuntansi Aset BMN untuk Pemerintah Pusat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk neraca..” Menurut PMK Nomor 171/2007, dijelaskan bahwa SIMAK-BMN adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber keuangan dan aset untuk tujuan penyusunan laporan.

Ke-dua, Sistem informasi penatausahaan BMN menghasilkan informasi data rinci (*detail*) untuk memenuhi kebutuhan manajemen seperti “Perencanaan Penganggaran, Perencanaan Pengadaan, Perencanaan Pemeliharaan, Perencanaan Penghapusan dan lain-lain”. Sistem ini belum efektif dan efisien karena masih secara manual. Menurut RM. Sadewo menyatakan bahwa penatausahaan BMN merupakan rangkaian kegiatan dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, Sedangkan menurut PMK nomor PMK 120/06/2007, adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun sudah ada sistem aplikasi SIMAK-BMN dan Sistem Informasi Penatausahaan BMN, masih banyak permasalahan dihadapi seperti: Informasi data aset BMN yang disajikan belum *valid*/tidak diyakini kewajarannya sehingga berdampak kepada perencanaan kurang akurat. Menurut PMK nomor PMK-059/PMK.06/2005 tentang: Pelaporan Keuangan Negara disebutkan bahwa informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sedangkan menurut Getta (2008: 1), dalam pemerintahan yang baik ditandai dengan 3 (tiga) elemen, yaitu: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga informasi harus dapat dipertanggung jawabkan.

Karena informasi data aset BMN belum *valid* maka perencanaan kurang akurat akibatnya pengambilan keputusan kurang tepat. Menurut H Malaya SP Hasibuan, perencanaan merupakan hal ini sangat penting karena, perencanaan akan mempengaruhi koordinasi, artinya semakin baik dan terincinya rencana maka akan semakin mudah dilakukan koordinasi. Jika perencanaan disusun dengan baik dan hubungan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek terintegrasi dengan baik serta harmonis, maka penerapan organisasi akan lebih mudah,

Berdasarkan analisis temuan tersebut di atas sudah menjadi suatu kebutuhan dan merupakan hal yang penting untuk segera membuat sistem informasi manajemen pengelolaan aset BMN yang efektif dan efisien serta andal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Agus Witjaksono (2009), bahwa Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan pemerintahan yang baik dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta dalam rangka menjamin terlaksananya tertib pengelolaan BMN adalah dengan membangun sistem informasi manajemen.

Menurut William Leffingwell & Edwin Robinson, sistem informasi manajemen yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan (prakondisi), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana.

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi serta program kegiatan Bagian Perlengkapan, maka penulis mengusulkan untuk membuat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yang cocok untuk penanganan terhadap aset BMN di BMKG adalah dengan membuat “*aplikasi sistem informasi manajemen perlengkapan (SIM-P) berbasis teknologi komputer*”.

Salah satu keunggulannya adalah dapat bekerja secara terprogram (*programmable*), dapat bekerja terus-menerus tanpa intervensi manusia, secara rutin, cepat dan akurat. Konsep ini nantinya dapat dikembangkan melalui konsep jaringan (*Networking*) LAN (*Local Area Network*) dan informasi berbasis *web site*, karena dalam wacana administrasi publik baru (*new public administration*), sistem informasi administrasi ditempatkan sebagai variabel utama dalam mendukung terlaksananya administrasi yang efisien, efektif, berkeadilan, dan tentunya akuntabel (Makhdum P dan Anwar S, 2004:1).

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis ingin memberi masukan kepada pimpinan BMKG bahwa sistem informasi yang cocok untuk pengelolaan terhadap aset BMN di BMKG adalah dengan membuat “*Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset BMN (SIM-P) Berbasis Komputer*”.

Salah satu keunggulan SIM-P adalah dapat bekerja secara terprogram (*programmable*), dapat bekerja terus-menerus tanpa intervensi manusia, secara rutin, cepat dan akurat. Konsep ini nantinya dapat dikembangkan melalui konsep jejaring (*Networking*) LAN (*Local Area Network*) dan informasi berbasis *web site*, karena dalam wacana administrasi publik baru (*new public administration*), sistem informasi administrasi ditempatkan sebagai variabel utama dalam mendukung terlaksananya administrasi yang efisien, efektif, berkeadilan, dan tentunya akuntabel (Makhdum P dan Anwar S, 2004:1).

SIM-P berguna untuk memantau sistem kerja yang efisien, dan biaya-biaya, oleh karena itu agar SIM-P efektif, perlu dirancang untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, ringkas, relevan, dan lengkap tentang sumber daya yang ada. Bila SIM-P digunakan secara tepat, dapat menjadi instrumen yang sangat berharga untuk perencanaan dan implementasi perencanaan strategik organisasi. Gambaran hasil akhir SIM-P berupa:

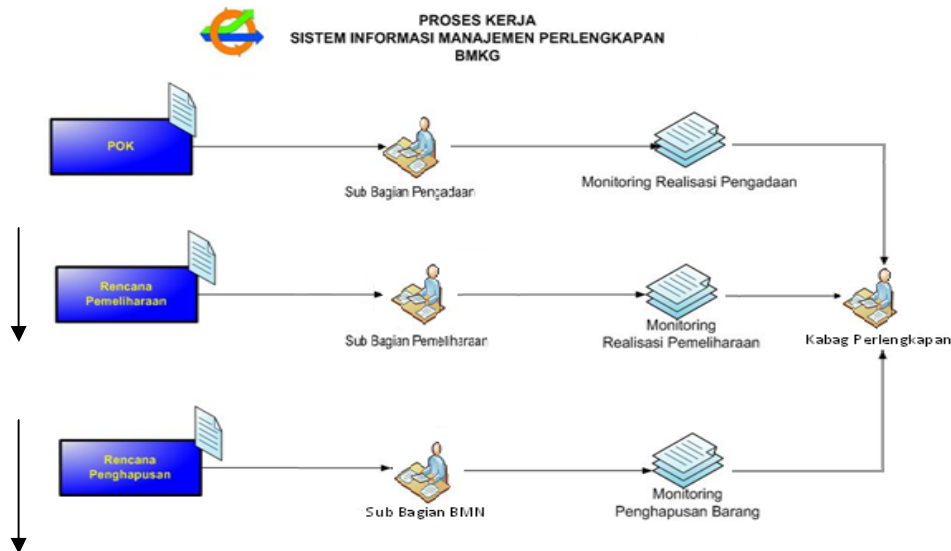
1. Pengawasan Realisasi Pengadaan
2. Pengawasan Realisasi Pemeliharaan
3. Pengawasan Penghapusan BMN
4. Pengawasan Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan SIM-P seluruh proses akan menjadi lebih cepat dan mudah dimonitor. Para Pimpinan maupun pejabat terkait dapat pula dengan cepat memperoleh informasi yang dikehendaki penting guna mendukung proses pengambilan keputusan. Keunggulan dari SIM-P adalah kecepatan dan ketepatan informasi untuk pengelolaan data base perlengkapan, serta memudahkan dalam merencanakan perawatan peralatan. Sedangkan *Outcome*/manfaat dari SIM-P adalah kegiatan pemeliharaan peralatan dapat termonitor dengan cepat, sehingga bisa lebih efisien dan efektif serta mempermudah dalam pengelolaan peralatan. Indikator keberhasilannya adalah termanfaatkannya SIM-P dan pelaporan dapat dilakukan secara cepat. Atau dengan kata lain, terbentuknya sistem kerja yang efisien, efektif, lengkap dan terukur

Dalam teori manajemen, kita mengetahui bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi yang perlu dilaksanakan di dalam pengelolaan suatu organisasi. Di luar faktor-faktor ekstern, seandainya tiap orang akan selalu kompeten dan sepenuhnya jujur (*competent and totally honest*) para pemilik perusahaan boleh mempercayakan usahanya kepada para direktur, kemudian direktur mendelegasikan wewenangnya kepada para manajer, dan para

pegawai bawahannya pasti menyelesaikan pekerjaannya sesuai keinginan pimpinan (*done thru the other peoples*), semuanya akan beres. Kenyataannya kan tidak demikian (Sanyoto Gondodiyoto, 2009:5).

Gambaran hasil akhir Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan adalah sistem kerja yang efisien dan efektif serta terukur berupa:



Gambar 1: Proses Kerja Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap kegiatan pengelolaan aset BMN di BMKG diperoleh hasil bahwa terdapat 2 (dua) buah Sistem informasi BMN yaitu:

- a. Penerapan Sistem Aplikasi SIMAK-BMKG, menghasilkan informasi data kumulatif (*global*) untuk memenuhi kebutuhan “Pelaporan Neraca Akuntansi Aset BMN untuk Pemerintah Pusat”
- b. Sistem informasi penatausahaan BMN menghasilkan informasi data rinci (*detail*) untuk memenuhi kebutuhan manajemen seperti “Perencanaan Penganggaran, Perencanaan Pengadaan, Perencanaan Pemeliharaan, Perencanaan Penghapusan dan lain-lain”. Sistem ini belum efektif dan efisien karena masih secara manual.

Meskipun sudah ada Sistem Aplikasi SIMAK-BMKG dan Sistem Informasi Penatausahaan BMN, masih banyak permasalahan dihadapi seperti: Informasi data aset BMN yang disajikan belum *valid* atau tidak diyakini kewajarannya sehingga berdampak kepada perencanaan kurang akurat. Karena perencanaan kurang akurat maka pengambilan keputusan kurang tepat.

Berdasarkan analisis temuan tersebut di atas sudah menjadi suatu kebutuhan dan merupakan hal yang penting untuk segera membuat sistem informasi manajemen pengelolaan aset BMN yang efektif dan efisien yang berfungsi sebagai sistem pengendalian intern.

Implikasi

Mengharuskan manajemen BMKG untuk segera membuat sistem informasi yang cocok untuk penanganan BMN di BMKG yaitu membuat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan (SIM-P) berbasis computer.

Mengharuskan pimpinan BMKG untuk memasukkan anggaran pembuatan SIM-P tersebut sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) ke dalam APBNP sebagai konsekuensinya.

2. Saran

Agar Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan (SIM-P) dapat dipahami oleh seluruh petugas pengelolaan aset BMN, perlu diadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat).

- a. Diadakan sosialisasi dan pengarahan secara berkala kepada seluruh unit yang terkait dalam pengelolaan aset BMN.
- b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan pengelola BMN.
- c. Selalu melakukan up-date SIM-P setiap ada perubahan, walau tidak diperlukan oleh pimpinan,
- d. Untuk menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi perlu dikembangkan sistem komunikasi melalui konsep jaringan (*Networking*)

DAFTAR PUSTAKA

- Edy, Topo Ashari dan Desi Fernanda. *Membangun Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.2001
- Firmansyah. *Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.2008
- Getta. *Kepemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.2008.
- Gondodidoyo, Sanyoto. *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: BPK RI.2007.
- Makhdum Priyatno, Drs, MA dan Anwar Sanusi, Drs, MPA. *Teknologi Informasi dalam Pemerintahan*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.2004.
- Republik Indonesia. *UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51*.2004.
- Republik Indonesia. *Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.2007.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, Keterbukaan Sistem Informasi*, 2008.
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Nomor: Kep. 011 tahun 2008, tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pindahtangan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika*.2008
- Wahyu, Wing Winarno. *Sistem Informasi Manajemen*, UPP: STIM YKPN, Yogyakarta.2004.
- Witjaksono, Agus. *Sistem Informasi Pemerintah*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.2009.